

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Study ini akan mengelaborasi mengenai model Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Tebing Breksi yang ada di desa Sambirejo. Kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang dapat mempengaruhi antara pemimpin dengan bawahan yang mengingatkan pada perubahan nyata dalam mencerminkan tujuan bersama untuk mengembangkan visi dan misi yang akan dicapai. Dalam pencapaian sebuah tujuan, pemimpin memerlukan usaha yang harus dilakukan bersama orang-orang atau bawahan untuk dapat mencapai tujuan secara efektif. Kemampuan seorang pemimpin dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pada proses pembangunan di desa, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan desa wisata. Dalam hal pembangunan, sesuai dengan Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 menjelaskan pada dua pola pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan juga “Membangun Desa”, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta dapat menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar secara bertahap.

Dalam Undang-Undang tersebut, desa akan memperoleh dana sebesar satu Miliar atau bahkan lebih dari itu yang akan digunakan untuk kemandirian desa. Alokasi Dana Desa merupakan instrument yang sangat penting dalam terlaksanakannya otonomi dan desentralisasi di tingkat desa yang diharapkan dapat memberikan peluang lahirnya pemerintahan desa yang lebih mandiri, demokratis, dekat dengan struktur dan kultur masyarakat pada tingkat lokal dan bisa lebih kreatif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. (Sumardjo, 2018). Melalui kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kemendes PDTT (Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi) pada tahun 2017 memberikan anggaran ADD Nasional sebesar 60 Triliun yang disebarkan di 72 ribu desa di Indonesia. Kurang lebih 70 persen dari Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan publik. Hal ini seharusnya dapat membuat seluruh masyarakat desa lebih memiliki kesempatan dalam memberikan aspirasi ataupun kontribusinya kepada daerah, salah satunya dalam mengelola keuangan desa yang digunakan untuk pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pembangunan desa itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung di suatu desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pembangunan nasional yang meliputi segala bagian dari kehidupan dalam penghidupan masyarakat. Dalam hal pembangunan, pemerintahan Indonesia merencanakan berbagai program diantaranya seperti program inpres desa yang tertinggal, program pembangunan infrastruktur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM, dan lain sebagainya. Semua

program yang ada di atas bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.

Salah satu permasalahan yang mendasar dalam proses pembangunan di daerah pedesaan ialah pada penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah ataupun desa ialah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat menyelesaikan misinya dalam menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Untuk mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus dapat melaksanakan pembangunan yang didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal (Rahmawati & Suyanto, 2016).

Upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa ialah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Hal ini dilihat dari adanya kemampuan yang dimiliki oleh kepala desa dalam memberdayakan masyarakat yang ada di desa untuk dapat mandiri, inovatif dan kreatif dalam segala aspek kehidupan. Dengan begitu, kemampuan seorang kepala desa dalam memberdayakan masyarakat di desa, tentu akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat desa. Salah satu pembangunan desa yang harus direncanakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan membangun desa wisata, yang mana desa wisata dapat menjadi salah satu sumber pokok pendapatan bagi masyarakat sekitar. Desa wisata juga dapat membantu mereka para masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, karena masyarakat sekitar dapat memanfaatkan desa wisata sebagai lapangan

kerja. Di samping itu, mereka dapat merawat, menjaga serta meningkatkan sumber daya yang ada.

Perlu adanya kerjasama antara kepala desa dengan masyarakat desa sekitar dalam pembangunan desa wisata. Dalam mewujudkan desa wisata yang maju memerlukan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara bersama. Partisipasi dari masyarakat sekitar begitu penting dalam memilih, merencanakan, serta melaksanakan program yang telah disusun oleh kepala desa. Pentingnya pengelolaan desa wisata melalui kelembagaan yang beranggotakan masyarakat lokal menjadi landasan dari adanya inisiasi pembentukan kelembagaan dalam pembangunan desa wisata Tebing Breksi yang ada di Sambirejo.

Tebing Breksi merupakan salah satu objek wisata berupa tebing tinggi yang ada di desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman DIY yang memberikan pemandangan indah dari ketinggian. Pemandangan yang ada di sekitar Tebing Breksi dapat membuat pikiran tenang dan segar, hal ini karena di sana banyak dikelilingi tebing-tebing tinggi yang besar dan pemandangan Kota Klaten dan Jogja yang dapat dilihat dari atas Tebing Breksi. Suasana di sekitar Tebing Breksi juga sangat tenang karena jauh dari bising suara kendaraan. Tebing Breksi juga pernah mendapatkan penghargaan pada tanggal 10 Desember 2019, dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penghargaan yang diterima ialah juara Harapan III Desa Wisata kategori Maju. Penghargaan yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa, yaitu Taufik Madjid kepada sekretaris desa Sambirejo Mujimin di Tebing Breksi (Flo, 2019). Penghargaan yang diberikan adalah sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah desa dan kelompok wisata yang sudah memasukkan lokasi wisata di desa. Tebing Breksi juga memiliki potensi yang cukup besar apabila dapat menjadi salah satu objek wisata terkenal di wilayah desa Sambirejo. Akan tetapi, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui keberadaan Tebing Breksi karena lokasinya yang jauh dari kota dan terletak di dalam desa yang cukup terpencil, padahal Tebing Breksi bisa menjadi sumber potensi pendapatan yang cukup besar apabila dapat dikelola dan dikembangkan. Kepala desa memiliki peran yang penting dalam pengembangan sebuah desa terpencil yang memiliki potensi sebagai desa wisata dengan sumber daya yang ada di sekitar. Dengan demikian, dapat dilihat bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh kepala desa dalam menggerakkan masyarakat pada pembangunan suatu desa wisata.

Melihat latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Model Kepemimpinan Kepala Desa Demokratis periode 2011-2019 Dalam Pembangunan Desa Wisata (Studi Kasus Tebing Breksi di desa Sambirejo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana model kepemimpinan Kepala Desa Bapak Mujimin pada periode 2013-2019 dalam pembangunan desa wisata Tebing Breksi yang ada di desa Sambirejo?

1.3 Tujuan

Tujuan dari rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui model kepemimpinan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bapak Mujimin periode 2013-2019 dalam pembangunan desa wisata Tebing Breksi di desa Sambirejo?

1.4 Manfaat

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini terkait dengan model yang dilakukan oleh Kepala Desa periode 2013-2019 dalam pembangunan desa wisata Tebing Breksi di desa Sambirejo , dalam hal ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi penulis dan juga pembaca dalam mengetahui strategi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pembangunan desa wisata.

1.4.2 Praktis

1. Bagi pembaca untuk menambah pengetahuan dan menambah ilmu terkait dengan model yang dilakukan oleh Kepala Desa periode 2013-2019 dalam pembangunan desa wisata.
2. Bagi Desa Wisata Tebing Breksi diharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan model pembangunan desa wisata yang lebih baik dari sebelumnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini akan menjadi referensi atau bahan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Literatur Review

Tabel 1.1 Literatur Review

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	(Gunawan, 2020)“Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Aparat Pada Masyarakat di Desa Kalibiru Kecamatan Poleang Selatan Kabupaten Bombana”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung menentukan informan yang akan diwawancarai.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Kali Biru menjalankan beberapa fungsi dalam kepemimpinan yaitu: Fungsi instruktif, Fungsi partisipasif, Fungsi konsultif, Fungsi delegasi, Fungsi pengendalian. Adapun indikator pendorong kepemimpinan Kepala Desa Kali Biru adalah: sifat leadership, bertanggung jawab, mendapatkan kepercayaan dari bawahan, membuka ruang diskusi dengan bawahan dan aparat desa bekerja sama dengan	Metode penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan	Strategi yang dilakukan dalam pembangunan desa wiata Objek penelitian adalah Desa Wisata Tebing Breksi

			prosedur yang ada dan mematuhi perintah dan arahan dari kepala desa Kali Biru.		
2.	(Sunarsi, Winata, Gunartin, & Paeno, 2020) “Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengembangan Desa Cidokom Gunung Sindur Kabupaten Bogor”	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, pengamatan langsung dan wawancara.	Hasil penelitian didasarkan pada perolehan data pendukung seperti jumlah penduduk yang ditinjau dari jenjang Pendidikan dan status sosial ekonomi dengan mata pencaharian yang mana hal ini masih menunjukkan rendahnya tingkat Pendidikan di Desa Cidokom dan tentunya juga rendahnya kualitas SDM yang ditunjukkan pada masih tinggi jumlah penduduk yang berstatus pengurus rumah tangga.	Metode penelitian kualitatif Teknik pengumpulan data observasi dan wawancara	Strategi Kepala Desa dalam Pembangunan desa wisata Objek yang digunakan adalah Desa Wisata Tebing Breksi
3.	(Fathoni, Suryadi, & Rengu, 2019) “Gaya Kepemimpinan Kepala	Metode penelitian yang digunakan adalah	Hasil penelitian adalah gaya kepemimpinan kepala desa merupakan	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Teknik pengumpulan data dengan observasi, studi

	Desa dalam pembangunan Fisik Desa (Studi Kasus di Desa Denok Kecamatan Lumajang Kab. Lumajang)	deskriptif kualitatif	salah satu factor penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa, dan adanya partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu dari ciri khas pembangunan desa dan merupakan unsur utama yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya suatu pembangunan desa.		kepuustakaan dan wawancara
4.	(Lamangida, Akbar, & Hasan, 2017) “Kepemimpinan Kepala Desa dalam Membangun Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto”	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen	Hasil penelitian adalah Kepala Desa sebagai pemimpin formal di desa sebagai seorang motivator, fasilitator, dan mediator sangat penting dalam menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan. Oleh sebab itu,	Metode penelitian kualitatif	Objek yang digunakan adalah Tebing Breksi

			fungsi ini harus dilaksanakan dan diimplementasikan oleh seorang kepala desa juga merupakan peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan , menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk jujur, bijaksana dan mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa serta dilengkapi dengan perangkat desa yang berkualitas.		
5.	(Rahmawati & Suyanto, 2016)“ Kepemimpinan Kepala Desa Jombangdeli k Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dalam Mendorong	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dalam kepemimpinannya menggunakan perilaku berorientasi tugas yang dilakukan melalui	Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pokok permasalahan yang dibahas Objek yang digunakan

	Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Lingkungan”	dan dokumentasi.	pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban. Selain itu dengan perilaku hubungan kepala desa mampu mendorong partisipasi masyarakat pada pengelolaan lingkungan dengan berbagai upaya.		
6.	(Sumardjo, 2018)“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Desa Pamijahan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)	Penelitian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif yang didukung data kualitatif berupa wawancara mendalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.	Teknik pengumpulan data dengan wawancara	Metode penelitian yang digunakan Pokok permasalahan yang dibahas Objek yang digunakan dalam penelitian
7.	(Syafitri & Suriani, 2019)“Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan	Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian adalah peran kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan	Teknik pengumpulan data dengan observasi	Metode penelitian yang digunakan Teknik pengumpulan data

	Pembangunan di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”		pembangunan di Desa Sejati berada pada interval berperan sesuai dengan tanggapan responden dan observasi penulis.		wawancara , dokumentasi dan studi kepustakaan
8.	(Ristiawan, 2019)“Perencanaan Pengelolaan Wisata Pedesaan di Desa Bumiaji, Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur”	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif	Hasil penelitian ini adalah program pengabdian masyarakat di Desa Bumiaji, Kota Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini akan menjadi upaya para dosen untuk berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan masyarakat desa melalui penerapan dan aplikasi keparannya.	Teknik pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi	Pokok masalah yang dibahas Objek yang digunakan dalam penelitian
9.	(Safitri, 2019) “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pangkah Kulon Kecamatan Ujungpangkajene	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kepala desa Pangkah Kulon dalam memberdayakan masyarakat desanya sudah baik dengan menggunakan analisis teori pemberdayaan	Teknik pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi	Objek yang digunakan dalam penelitian adalah Tebing Breksi

	h Kabupaten Gresik”		yang dilakukan oleh kepala desa diberikan berbeda-beda kepada masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan sector mata pencaharian.		
10.	(Hayadi, 2015) “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015)	Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Teknik pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi	Hasil penelitian adalah kepala desa selaku pemerintah desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan perannya sebagai kepala desa dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan atau program pembangunan desa yang sudah berjalan hingga saat ini.	Metode penelitian kualitatif	Strategi yang dilakukan kepala desa dalam pembangunan desa wiata Objek yang digunakan dalam penelitian adalah Tebing Breksi.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin “leader” yang memiliki arti sebagai pribadi yang mempunyai sifat kecakapan dan kelebihan, terutama pada suatu bidang tertentu, sehingga ia mampu

untuk dapat mempengaruhi orang lain agar supaya bisa melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian suatu tujuan tertentu (Kartini & Kartono, 2010).

Kepemimpinan juga merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan suatu organisasi, terlebih lagi dalam menuju perubahan. Menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2013) menjelaskan bahwa kepemimpinan meliputi beberapa proses yang mempengaruhi dalam menentukan tujuan suatu organisasi memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya (Rivai & Mulyadi, 2009).

Berdasarkan definisi yang ada di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan diartikan sebagai pembuatan keputusan atau sebagai inisiatif untuk melakukan tindakan dalam menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan suatu permasalahan bersama dengan cara menggerakkan orang-orang yang ada dalam kelompoknya atau organisasinya untuk mencapai tujuan bersama. Robert Miljus dalam bukunya *Human Relation On The Stop Flor* menjelaskan bahwa tanggung jawab seorang pemimpin ada beberapa hal, diantaranya:

1. Menentukan tujuan sebuah pelaksanaan kerja yang nyata atau realistis ,dalam hal ini artinya adalah kuantitas, kualitas, keamanan dan yang lainnya.
2. Melengkapi kebutuhan para karyawan dengan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya
3. Mengkomunikasikan kepada karyawannya tentang apa yang diinginkan oleh mereka.
4. Mendelegasikan wewenang apabila diperlukan dan mengundang partisipasi apabila memungkinkan.
5. Memberikan beberapa reward berupa hadiah yang sepadan terhadap kinerjanya untuk mendorong motivasi prestasi karyawannya.
6. Menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan yang efektif.
7. Menilai pelaksanaan pekerjaan dan mengkomunikasikan hasilnya.
8. Menunjukkan perhatian kepada seluruh karyawannya.

1.6.2 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan atau *leadership* merupakan kemampuan seorang pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini adalah pengikut, bawahan atau karyawannya. Sehingga, orang lain dapat berperilaku sebagaimana yang telah dikehendaki oleh seorang pemimpin. Seringkali dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu

proses sosial. Dalam hal kedudukan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan usaha. Selanjutnya, sebagai salah satu proses sosial, kepemimpinan dapat meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu badan usaha yang mengakibatkan gerak atau tindakan dari warga masyarakat.

Menurut C.N. Cooley, 1902 "*The leader is always the nucleus of tendency, and on the other hand, all social movement, closely examined will be found to consist of tendencies having such nucleus*". Artinya adalah, pemimpin selalu menjadi titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. Bagi setiap lembaga organisasi kepemimpinan yang efektif adalah merupakan sebuah kunci keberhasilan. Menurut Wahjosumijo, 2003 dalam praktek organisasi kata memimpin mengandung konotasi sebagai "menggerakkan, mengarahkan, membina, melindungi, memberi teladan, memberi dorongan, memberi bantuan dan sebagainya". Dari kata tersebut dapat dirumuskan bahwa memimpin memiliki makna yaitu kemampuan untuk menggerakkan segala sumber daya yang ada sehingga dapat di dayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal

ataupun non formal akan selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang mempunyai kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayai untuk mengatur orang lain. Hal ini biasanya dilakukan oleh pemimpin atau manajer.

Kepemimpinan memiliki arti yang bervariasi, seperti ketika seseorang mencoba mendefinisikan konsep untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan biasanya dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Beberapa faktor yang dapat menggerakkan orang yaitu karena adanya ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan. Kepemimpinan juga dikatakan sebagai proses yang mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Ada tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal tersebut, yaitu:

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik itu bawahan ataupun pengikutnya

2. Kepemimpinan itu melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.

Jadi, kepemimpinan itu pada dasarnya adalah proses untuk mempengaruhi atau memberi contoh dari seorang pemimpin kepada pengikutnya atau bawahannya dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu organisasi, seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan melalui kepatuhan, kehormatan, serta kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama, kepemimpinan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan, melibatkan tiga hal yaitu, pemimpin, pengikut dan situasi tertentu, kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan dan sumber pengaruh dapat secara formal ataupun non formal.

1.6.3 Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau suatu organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Secara operasional Veithzal

Rivai dan Deddy Mulyadi (2009) membedakan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:

1. Fungsi instruksi
2. Fungsi konsultasi
3. Fungsi partisipasi
4. Fungsi delegasi
5. Fungsi pengendalian

Kepemimpinan Berdasarkan Teori Situasional

Teori ini tidak membahas gaya kepemimpinan apa yang paling baik dan gaya kepemimpinan apa yang tidak baik, akan tetapi teori ini mengemukakan bagaimana Tindakan seorang manjer dalam situasi tertentu perilaku kepemimpinannya yang efektif. Teori ini juga tidak membahas gaya dan perilaku yang berpola, tetapi membahas perilaku yang berdasarkan keadaan. Artinya manajer dalam menjalankan kepemimpinannya tidak berpedoman pada salah satu pola perilaku dari waktu ke waktu melainkan didasarkan pada analisis manajer setelah mempelajari sistuasi tertentu, lalu melakukan pendekatan yang tepat.

Fielder dalam Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2009) menghubungkan perilaku kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi oleh pemimpin pada suatu saat. Fielder beranggapan bahwa dalam situasi yang berbeda diperlukan pendekatan yang berbeda demi tercapainya efektivitas. Fielder juga menjelaskan bahwa

keberhasilan seorang pemimpin tergantung dari kepandaiannya membaca situasi yang sedang terjadi di dalam organisasi yang dipimpinnya. Teori kepemimpinan ini menurut Fielder menentukan keberhasilan seorang pemimpin tergantung dari faktor situasional yang meliputi:

1. Hubungan atasan dengan bawahan

Dalam arti tingkat kepercayaan, rasa hormat dan kekaguman para bawahan terhadap atasan mereka.

2. Struktur tugas

Sejauh mana tugas-tugas yang ditegaskan dengan baik, terstruktur atau tidak dan apakah disertai oleh prosedur yang jelas atau tidak, serta melalui prosedur yang tegas.

3. Posisi kewenangan

Kedudukan kewenangan pemimpin berdasarkan kewenangan formal yang dimiliki, kewenangan pemimpin dalam banyak variabel sesuai kewenangan yang dimilikinya dalam organisasi, seperti dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pegawai, penegakan kedisiplinan, promosi, kenaikan upah dan yang lainnya.

Kepemimpinan situasional didasarkan pada kepercayaan bahwa setiap orang ingin dan mampu berkembang dan tidak ada gaya kepemimpinan terbaik yang bisa mendukung perkembangannya. Pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan

terhadap keadaan situasional yang sedang terjadi (Rivai & Mulyadi, 2009).

1.6.4 Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku seorang individu yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain (Thoha, 2009). Adapun beberapa jenis gaya kepemimpinan adalah sebagai berikut:

1. Penemuan *Iowa University*

Terdapat 3 gaya kepemimpinan yakni otokratis, demokratis dan *Laissez Faire*

2. Penemuan *Ohio University*

- a. Konsiderasi (*consideration*)
- b. Inisiasi Struktur (*Initiating Structure*)

3. Penemuan *Michigan University*

- a. Berorientasi pada tugas (*Job Oriented*)
- b. Berorientasi pada bawahan (*Employee Oriented*)

4. Gaya kepemimpinan *Kontinum Tannenbaum da Schmidt*

- a. Pemimpin membuat keputusan kemudian mengumumkan kepada bawahannya
- b. Pemimpin menjual dan menawarkan keputusan terhadap bawahan
- c. Pemimpin memberikan pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan mengundang pertanyaan-pertanyaan

- d. Pemimpin memberikan keputusan bersifat sementara yang kemungkinan dapat diubah
 - e. Pemimpin memberikan persoalan dan meminta saran-saran pemecahannya kepada bawahan
 - f. Pemimpin merumuskan Batasan-batasannya dan meminta kelompok bawahan untuk membuat keputusan
 - g. Pemimpin mengizinkan bawahan melakukan tugas fungsi-fungsinya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh pemimpin.
5. Gaya kepemimpinan Kontingensi Fiedler
 6. Gaya kepemimpinan Situasional Hersey dan Blanchard
 7. Gaya Kepemimpinan Jalan Tujuan House (*Path Goal Theory*)

Hersey dan Blanchard dalam Yukl (1989) mengembangkan teori kepemimpinan yang pada awalnya disebut "*life cycle theory of leadership*" dan kemudian dinamakan "*situational leadership theory*". Argument dasar dari teori ini adalah kepemimpinan yang efektif memerlukan kombinasi hubungan, serta mempertimbangkan tingkat kematangan bawahan. Berdasarkan kombinasi tersebut dapat diterapkan beberapa gaya kepemimpinan *telling*, *selling*, *participating*, dan *delegating* sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Gaya *telling* (bercerita) berlaku dalam situasi orientasi tugas tinggi dan orientasi hubungan yang rendah dan pegawai sangat

tidak dewasa, sehingga pemimpin harus memberikan pengarahan dan petunjuk untuk mengerjakan berbagai tugas.

2. Gaya *selling* (menjual) berlaku pada orientasi tugas tinggi dan orientasi hubungan juga tinggi, sementara tingkat kedewasaan pegawai cukup. Dalam situasi seperti ini, pemimpin memberikan pengarahan secara seimbang dengan memberikan dukungan, meminta dan menghargai masukan dari pegawai.
3. Gaya *participating* (partisipasi) dengan orientasi juga rendah dan orientasi hubungan tinggi, serta tingkat kedewasaan pegawai tinggi. Untuk itu pimpinan lebih kolaboratif, ada kedekatan emosional sehingga mengedepankan konsultasi, pembimbingan dan dukungan serta sangat sedikit pengarahan tugas.
4. Gaya *delegating* (delegasi), cocok untuk situasi orientasi tugas rendah dan orientasi hubungan juga rendah, serta pegawai sangat dewasa. Dalam hal ini pemimpin memberikan tanggungjawab penuh kepada pegawai untuk menyelesaikan tugas. Pemimpin cukup mengetahui laporan, dan memberikan dukungan tanpa memberikan pengarahan.

Menurut Kartono (2013) menjelaskan bahwa pengukuran gaya kepemimpinan dapat dilihat dari:

1. Kemampuan Mengambil Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan

mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

2. Kemampuan motivasi

Kemampuan memotivasi merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya dalam membentuk keahlian maupun ketrampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan menjalankan kewajibannya, dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan.

3. Kemampuan komunikasi

Kemampuan komunikasi merupakan kecakapan maupun kesanggupan penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain memahami apa yang dimaksudkan dengan baik, secara langsung lisan ataupun tidak langsung.

4. Kemampuan Mengendalikan Bawahan

Seorang pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk di dalamnya memberitahukan orang lain apa yang

harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya ialah supaya tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik.

5. Tanggung jawab

Seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab kepada bawahannya. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban yang wajib menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

6. Kemampuan Mengendalikan Emosional

Kemampuan mengendalikan emosional adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita mengendalikan emosi semakin mudah menggapai kebahagiaan.

Teori kepemimpinan dalam literatur terdapat beberapa macam teori dan masing-masing literatur saling melengkapi. Di antara literatur yang dapat membahas tipe kepemimpinan yang dapat digunakan oleh seseorang pemimpin dalam kepemimpinannya adalah sebagai berikut:

1. Menurut Sondang P. Siagian, ada lima tipe kepemimpinan yang diakui keberadaannya yaitu: (a) Tipe Otokratis, (b) Tipe Paternalistik, (c) Tipe Kharismatik, (d) Tipe Laisser Faizer, (e) Tipe Demokratis. (Siagian, 2003)

2. Menurut M. Ngalim Purwanto, ada tiga tipe kepemimpinan yaitu: (a) Kepemimpinan Otoriter, (b) Kepemimpinan Laisser Faizer, (c) Kepemimpinan Demokratis. (Purwanto, 2004).

Dari berbagai macam pembagian tipe kepemimpinan di atas dapat dipahami urainnya sebagai berikut:

- a. Tipe Kepemimpinan Otoriter

Tipe kepemimpinan yang mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpin semacam ini ingin berkuasa penuh dalam berbagai situasi dan dalam menjalankan roda pemerintahannya tanpa konsultasi dengan bawahannya. Kepemimpinannya otokratis itu berdasarkan kekuasaan dan paksaan yang mutlak dan biasanya yang dikembangkan dalam kegiatannya hanya melaksanakan perintah atasan, sementara bawahan tidak diberi kesempatan untuk berinisiatif dan mengeluarkan pendapat-pendapat. Dalam kepemimpinan otokratis seorang pemimpin angat egois, menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan menurut kehendaknya sendiri dan juga dapat disebut pemimpin diktator. Tipe kepemimpinan semacam ini memiliki keuntungan

yaitu kedisiplinan sangat tinggi dan dapat mengontrol pekerjaan bawahannya dengan mudah. Adapun kekurangannya yaitu bawahan tidak memiliki kreatifitas, dikarenakan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan pengambilan keputusan untuk perkembangan organisasi.

b. Tipe Kepemimpinan Paternalistik

Menurut Kartini, Kartono, teori kepemimpinan paternalistik yaitu tipe kepemimpinan yang kebabakan dengan sifat-sifat antara lain:

- Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan.
- Dia bersikap terlalu melindungi (*over protective*)
- Jarang dia memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri
- Dia hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif.
- Dia tidak pernah memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikutnya dan bawahannya untuk

mengembangkan imajinasi dan daya kreatifitas untuk mereka sendiri.

- Selalu bersikap maha tau dan maha besar

Selain itu juga, dalam kesempatan ini dibahas mengenai tipe kepemimpinan maternalistik. Tipe Kepemimpinan Maternalistik adalah adanya sikap over protective atau terlalu melindungi yang lebih menonjol, disertai kasih sayang yang berlebihan.

Demikianlah pembahasan tipe kepemimpinan paternalistik dan beberapasifat atau karakteristiknya, serta kepemimpinan maternalistik, untuk dapat dimengerti dan dipahami bgi kita yang konsen trhadap masalah kepemimpinan.

c. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Teori kepemimpinan ini sangat berbeda dengan tipe kepemimpinan otokrasi yang mendasarkan pada kekuasaan, sedangkan tipe kepemimpinan demokratis melibatkan bawahan yang harus melaksanakan keputusan. Hal ini sesuai penjelasan Kartini Kartono bahwa tipe kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Selain itu juga

dapat dipahami definisi yang dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto bahwa kepemimpinan demokratis yaitu pemimpin yang partisipatif berkonsultasi dengan bawahan tentang tindakan dan keputusan yang diusulkan serta mendorong adanya keikutsertaan bawahan. Jalannya kepemimpinan demokratis mendorong adanya keikutsertaan bawahan. Jalannya kepemimpinan demokratis menurut Veitzhal Rivai ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Di bawah kepemimpinan demokrasi bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. Dalam kepemimpinannya melakukan musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah dan terciptalah iklim kerja yang sehat, saling membantu, dan saling pengertian di antara mereka. Selanjutnya, M. Ngalim Purwanto menjelaskan tentang sifat-sifat kepemimpinan demokratis, yaitu:

- Dalam menggerakkan bawahan bertitik tolak dari pendapat manusia itu makhluk yang termulia di dunia.

- Selalu berusaha untuk mensinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi bawahan
- Senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan
- Mngutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan
- Memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan dan membimbingnya
- Mengusahakan agar bawahan dapat lebih sukses daripada dirinya
- Selalu mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.

d. Tipe Kepemimpinan Laizzes Faire

Tipe kepemimpinan ini dipersepsi bahw roda pekerjaan organisasi diserahkan pada bawahannya. Seorang pemimpin memberikan keleluasaan pada bawahan dan menganggap bawahannya orang yang dewasa, sehingga pemimpin tidak perlu intervensi terhadap perjalanan organisasi. Di sini sang pemimpin percaya penuh pada bawahan atas keberhasilan, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai organisasi.

e. Tipe Kepemimpinan Kharismatik

Sondang P.Siagian menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan kharisma adalah suatu tipe kepemimpinan yang memiliki karakteristik yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tertentu itu dikagumi. (P.Siagian, 2003)

1.6.5 Kepala Desa

Desa dalam definisi universal, merupakan sebuah aglomerasi pemukiman di are pedesaan (rual). Di Indonesia, pengertian desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah sebuah kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat

desa dalam tata cara prosedur pertanggung jawabannya yang disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala BPD, kepala desa wajib memberikan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat untuk menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban tersebut. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa atau pilkades oleh penduduk setempat.

Kewenangan kepala desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Daerah (BPD)
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa

7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1.6.6 Kepala Desa dan Perannya

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya UU No 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepala Desa dapat diberikan penguasaan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dengan demikian, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa meliputi urusan pemerintahan yang sudah ada

berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa memiliki sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.

Di dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilannya adalah peranan kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini erat kaitannya dengan pola kepemimpinan yang dijalankan. Dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Dalam menjalankan tugas tersebut, maka Kepala desa memiliki fungsi diantaranya:

1. Menggerakkan potensi masyarakat

2. Melaksanakan tugas dan pemerintah atasannya
3. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa
4. Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kepala desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan masyarakat. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas mereka masing-masing.

1.6.7 Tugas Kepala Desa Sebagai Pemimpin

Kepala Desa harus mempunyai kemampuan, bakat, kecakapan, dan juga jiwa kepemimpinan, disisi itu dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Dari penjelasan di atas, maka kepala desa harus dapat menjalankan program pembangunan di Desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Seperti yang dijelaskan oleh Atmosudirjo,2002 bahwa seorang pemimpin harus mempunyai empat syarat pokok, diantaranya:

1. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan daripada orang di sekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang di emban.
2. Pemimpin harus menjadi teladan di lingkungannya, paling tidak harus menyadari bahwa kekurannya menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang di instruksikan kepada bawahannya.
3. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.
4. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, dalam hal ini seorang pemimpin harus cakap, mampu dan pandai dalam mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Taliziduhu Ndraha,2003 menjelaskan

bahwa konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua sub konsep yang hubungannya satu dengan yang lain, yaitu konsep kepemimpinan bersistem nilai sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal. Setiap saat, seorang pemimpin formal atau kepala yang berkepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat. Ia harus memilih peran, sebagai kepala atau sebagai pemimpin. Dilihat dari sudut pandang itulah, pada saat seseorang melakukan peran, ia harus mempertimbangkan peran yang lain. Peran apa yang akan mendukung peran apa, peran mana yang dapat menghambat peran mana, peran apa *conflicting* dengan peran apa dan yang lainnya.

Kepala desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Kepemimpinan kepala desa sangatlah dibutuhkan untuk dapat mensukseskan pelaksanaan pembangunan desa (Safitri, 2019). Menurut Trisanto, 2011 menjelaskan bahwa salah satu tugas kepala desa urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. Salah satu tugas dari seorang kepala desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 1 adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1.6.8 Pengertian Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu usaha perubahan untuk mengembangkan diri pada suatu keadaan dan sifat tradisional menuju kearah yang lebih baik, hal ini umumnya dikenal di negara-negara berkembang sebagai suatu proses perubahan sosial yang besar. Menurut Siagian, 2006 menjelaskan bahwa proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dari perubahan berencana menuju mudernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah no 43 tahun 2014, maka desa diwajibkan memiliki perencanaan yang di susun secara berjangkan meliputi rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 6 tahun dan rencana kerja pemerintah kampung (RKPK) untuk jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan pengertian yang ada diatas terkandung maksud adanya usaha untuk mengembangkan dan memperbarui yang telah ada menjadi lebih baik, baik secara lahiriah ataupun secara batiniah kita ingin menikmati dan mengenyam hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Pembangunan merupakan cakupan yang luas dimana terdapat berbagai hambatan dan bukan dengan cara otomatis berjalan dengan sendirinya. Dalam bidang ekonomi harus ada kesempatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, koperasi dan swasta sebagaimana yang tertera dalam pasal 33 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945. Dengan usaha yang baik, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang menunjang pembangunan di bidang lainnya serta dapat mewujudkan lapangan kerja yang luas.

Pembangunan itu meliputi pembangunan dalam arti material dan spiritual menyangkut berbagai dimensi hidup dan kehidupan masyarakat desa. Sering orang mengartikan pembangunan adalah sebagai keseluruhan dari usaha-usaha masyarakat tertentu yang menyangkut bidang fisik saja, misalnya mendirikan gedung, membuat jembatan dan sebagainya. Dalam hal ini tidak disalahkan juga akan tetapi, suatu negara seperti Indonesia, pembangunan di bidang fisik hanyalah merupakan salah satu sisi atau bagian dari pembangunan nasional. Sebab, pembangunan nasional beda hakekatnya dengan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan baik yang menyangkut fisik maupun spiritual. Menurut Siagian, 1980 menjelaskan bahwa pembangunannya adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa (Siagian, 1980). Tjokromidjojo, 2001 menjelaskan bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang

berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

1.6.9 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu pembangunan yang dilaksanakan di desa yang berlandaskan kepada potensi wilayah yang memiliki sumber daya manusia (SDN) dan sumber daya alam (SDA) sekitar, serta dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada disekitar (Mubyarto, 1996). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat penting, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mereka haruslah memahami dan mengerti bahwa sesungguhnya mengenai keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya.
2. Mereka dapat menganalisa sebab dan akibat yang terjadi akibat dari berbagai kejadian yang ada di lingkungan sekitar masyarakat.
3. Mereka dapat merumuskan dan memberikan solusi atau jalan keluar dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
4. Mereka dapat memanfaatkan sumber daya pembangunan (SDA, SDM, dana dan teknologi) yang dimiliki untuk meningkatkan produksi serta produktivitas dalam mewujudkan sasaran pembangunan masyarakatnya.

5. Anggota masyarakat dengan upaya meningkatkan keinginan dan kemampuan SDM-nya sehingga dengan berpedoman pada kepercayaan diri dan keswadayaan yang kuat akan mampu menghilangkan beberapa ketergantungan terhadap pihak luar.

1.7 Definisi Konsepsional

1.7.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal ini adalah pengikut, bawahan atau karyawannya. Sehingga, orang lain dapat berperilaku sebagaimana yang telah dikehendaki oleh seorang pemimpin.

1.7.2 Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilakukan pada lingkup desa bersendikan potensi sumber daya yang dimiliki desa serta keadaan lingkungan yang ada disekitar dengan maksud hendak mencapai kesejahteraan masyarakat

1.8 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1.8.1 Kepemimpinan

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengukur suatu variable dengan menggunakan indikator-indikator tertentu untuk menjabarkan teori tentang kepemimpinan. Menurut Kartono

(2013) menjelaskan bahwa pengukuran gaya kepemimpinan dapat dilihat dari:

1. Kemampuan Mengambil Keputusan
2. Kemampuan motivasi
3. Kemampuan komunikasi
4. Kemampuan Mengendalikan Bawahan
5. Tanggung jawab
6. Kemampuan Mengendalikan Emosional

1.8.2 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan pedoman-pedoman dan ketentuan-ketentuan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan di desa yang meliputi aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, 2014 menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memandu peneliti untuk dapat mengeksplorasi dan memperoleh situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2014).

1.9.2 Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dalam buku Metodologi Penelitian Lexy J.Moleong,1988 menjabarkan bahwa sumber data utama dalam sebuah penelitian kualitatif ialah berupa kata-kata dan Tindakan yang selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen. Dengan demikian, padabagian ini jenis datanya akan dibagi ke dalam kata-kata dan juga tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik (Moleong, 1988). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Person*, ialah sumber data yang berasal dari jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh narasumber dengan melakukan tanya jawab yang berupa wawancara. Sumber data *person* dalam penelitian ini ialah Kepala Desa dan masyarakat yang ada di sekitar.
2. *Place*, ialah sumber data yang memberikan tampilan berupa kondisi yang sedang terjadi, dalam hal ini sumber data ini memberikan gambaran berupa keadaan sekitar dan pembelajaran ataupun kejadian yang berhubungan dengan keadaan yang diangkat dalam penelitian. Sumber data *place* dalam penelitian ini adalah Tebing Breksi yang ada di desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY.
3. *Paper*, ialah sumber data yang memberikan tampilan berupa data-data berupa huruf, angka, gambar dan yang lainnya. Data

yang dapat diperoleh dalam penelitian ini nantinya adalah profil Kepala Desa dibalik Pembangunan Desa.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek yang diteliti tanpa harus melalui perantara atau pihak ketiga. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data serta informasi secara langsung dengan instrument-instrumen yang telah ditetapkan, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan kemudian dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak ketiga. Data sekunder biasanya berupa bukti catatan, notulen, atau laporan historis yang tersusun rapi dalam arsip data documenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Kepala Desa di Desa Sambirejo.

1.9.3 Unit Analisis Data

Unit analisis data merupakan bagian dari pengambilan sampel yang digunakan dalam memperoleh informasi mengenai masalah

yang ada pada sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa kriteria responden yaitu sebagai berikut:

1. Wahyu Nugroho S.E selaku Kepala Desa yang ada di desa Sambirejo periode 2020-2026
2. Bapak Mujimin selaku Mantan Kepala Desa di Sambirejo periode 2013-2019.
3. Giyatno selaku direksi BUMDes yang ada di Sambirejo
4. Bapak Mujimin selaku Sekretaris di Kelurahan Sambirejo
5. Bapak Sujadi selaku Masyarakat Sekitar

1.9.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Berikut metode yang dilakukan diantaranya :

1. Observasi

Observasi ialah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan guna menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam penelitian. Hasil observasi biasanya dapat berupa aktivitas, peristiwa, objek dan suasana tertentu.

2. Wawancara

Wawancara ialah salah satu cara yang dapat dilakukan dalam metode pengumpulan data, dimana dalam pelaksanaannya adalah dengan melakukannya secara langsung, dengan berhadapan dan

berkomunikasi bersama subjek penelitian ataupun responden yang dituju. Wawancara merupakan proses percakapan dengan tujuan untuk mengarahkan seseorang, kejadian, kegiatan, organisasi dan yang lainnya. Dalam hal ini, dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber yang akan menjawab pertanyaan nantinya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan begitu maka akan diperoleh data-data dengan kriteria dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan peneliti untuk mencari data-data sebagai berikut:

- a. Sejarah Objek Penelitian
- b. Profil Kepala Desa

1.9.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif atau dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Kualitatif yang digunakan adalah menganalisis, menggambarkan serta merangkum berbagai peristiwa,, dari berbagai data yang didapat yang berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai masalah yang ada dalam penelitian. Teknik ini biasa dikenal dengan kualitatif karena

sifat data yang diperoleh berbentuk kualitatif serta tidak menggunakan alat ukur dari sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata juga tindakan. Selanjutnya, data diproses dan kemudian dilakukan penerjemahan dengan menarik hasil dan kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman, ada beberapa langkah dalam melakukan analisis data yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, ialah suatu proses pengumpulan data di lokasi yang akan digunakan untuk penelitian dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dianggap tepat serta untuk menentukan fokus dan pendalaman data dalam proses pengumpulan data selanjutnya.
2. Reduksi data, ialah suatu proses merangkum, menentukan serta memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dibandingkan sebelumnya.
3. Penyajian data, ialah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, serta ketertarikan kegiatan atau table.
4. Penarikan kesimpulan, ialah salah satu cara yang digunakan dalam pengumpulan data, peneliti harus paham dan tanggap

mengenai sesuatu yang diteliti Ketika berada di lapangan dengan
menyusun pola sebab akibat.